

EFEKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK UNTUK BIAYA NATURA SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENKAN PAJAK

Arfandi ¹, Muhammad Suun ² R. Sudirman ²

Email :

¹ arfandi7387@gmail.com

² muhammad.su'un@umi.ac.id

³ r.sudirman@umi.ac.id

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3} Dosen, Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Tax is one of the foundations of the State revenue sector, in order to ensure the sustainability of national development financing. For the business world tax is a source of cost without receiving direct rewards. Therefore, it takes a way for companies to find a way to make taxes efficient, and one of the ways used is through tax planning. The purpose of this study to determine the extent of tax planning for the cost natura can streamline the tax burden on PT. Bumi Karsa Makassar. The type of research is Descriptive. Data were obtained by using interview documentation. Data analysis using qualitative approach. The result of the research shows that tax planning for the natura cost to the company's employees can make the taxpayer more efficient, from the company by acknowledging the natura cost as the operational expense of the company. Management of PT. Bumi Karsa Makassar should apply tax planning for the cost of natura in efficient operation of the company

Keywords: tax planning, natura cost, company efficiency

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009). Perusahaan menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Topik tentang perpajakan menjadi menarik untuk dibahas karena bagi Negara, semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban. Di pihak lain perusahaan merupakan subjek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (Suronoto, 2013)

Perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia yang dinamis, iklim usaha dan kondisi perekonomian yang senantiasa mengalami perubahan berdampak terhadap adanya upaya upaya untuk beberapa perusahaan melakukan penyesuaian bagi wajib pajak. Di negara maju maupun

berkembang, wajib pajak perorangan maupun badan selalu berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999). Strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan dikemudian hari (Darmayasa dan Hardika, 2011). Dalam hal membayar pajak biasanya wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya yang dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Natakharisma dan Sumadi, 2014). Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning). Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk meng-update peraturan perpajakan. (Silitonga, 2013)

Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap Negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Puspita, 2010). Perencanaan pajak ini mereka lakukan dengan meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap Negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak atau penghematan pajak.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah memungkinkan wajib pajak untuk melakukan strategi dalam mengelola operasi usaha, sehingga jumlah yang dikeluarkan untuk biaya pajak dapat diminimalkan melalui suatu cara yang disebut dengan Perencanaan Pajak atau Tax planning. Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mepedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan. (R.J. Muaja., dkk, 2015)

Perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan pajak, perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik cenderung akan mengurangi laba bersih perusahaan (Wijaya dan Martani, 2011). Ditetapkannya penurunan tarif pajak, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik untuk mengurangi laba pada saat sebelum terjadi penurunan pajak (Santana dan wirakusuma, 2016)

Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak (Sentosa, 2007). Peminimalan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak. Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tax planning tidak hanya dapat dilakukan atas pajak badan, namun tax planning juga dapat dilakukan atas pajak orang pribadi (Schusheim & Gena, 2009).Tujuannya bukan untuk mengelak keuangan setiap tahunnya.Laporan keuangan ini disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Natakharisma dan Sumadi, 2014)

Manajemen pajak merupakan salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Menurut Sophar Lumbantoruan (dalam Suandy, 2011) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak adalah salah

satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Shaviro (2013), setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya (Nataharisma dan Sumadi, 2014)

Perencanaan pajak (tax planning) menurut Zain (2003) dalam Manajemen Perpajakan, adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hali itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Rori, 2013)

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*lopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang, belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Terdapat beberapa cara dalam perencanaan pajak, di mana salah satunya adalah bagaimana suatu perusahaan mengefisienkan pembayaran pajak yang berhubungan dengan suatu pemberlakuan biaya yang menghemat pajak khususnya dalam pemberian natura kepada pegawai perusahaan. Menarik disini adalah selain perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak, perusahaan juga secara tidak langsung memberikan fasilitas kepada pegawai, sehingga pegawai yang mendapat natura yang dimaksudkan dapat lebih produktif lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sebuah perusahaan, yang kemudian pemberian natura tersebut dijadikan biaya sebagai pengurang pengenaan pajak penghasilan perusahaan (Tekkay, 2015)

PT. Bumi Karsa Makassar adalah perusahaan Nasional yang merupakan anak perusahaan dari Kalla Group dengan bisnis utama dalam bidang Konstruksi, Investasi, Plant dan Alat Berat. PT. Bumi Karsa didirikan di Ujung Pandang pada tanggal 14 Februari 1969. PT. Bumi Karsa Makassar merupakan perusahaan yang berorientasi mencari laba. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat tax planning atas pembayaran pajaknya. Dengan dilaksanakannya tax planning maka perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate perpajakan yang berlaku.

Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus harus direncanakan secara baik agar tidak terjadi pemborosan (Suandy, 2011), oleh karena itu, perlu dilakukan efektivitas penerapan tax planning untuk mengetahui seberapa besar PT. Bumi Karsa Makassar dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya melalui biaya natura kepada pegawai perusahaan yang akan menjadi biaya sebagai pengurang pengenaan pajak penghasilan perusahaan.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Othenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

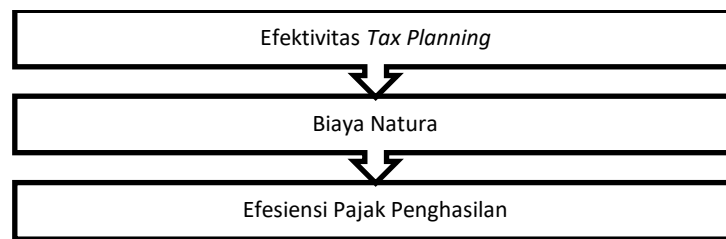
Perencanaan pajak adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/ transaksi yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak, dalam hal ini adalah mengefisienkan jumlah pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, besarnya pajak penghasilan sama dengan penghasilan kena pajak (taxable income) dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar laba kena pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung, juga semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (lopholes) yang menguntungkan (Sudirman, S., & Muslim, M. 2018). Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang, belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Terdapat beberapa cara dalam perencanaan pajak, di mana salah satunya adalah bagaimana suatu perusahaan mengefisienkan pembayaran pajak yang berhubungan dengan suatu pemberlakuan biaya yang menghemat pajak khususnya dalam pemberian natura kepada pegawai perusahaan. Menarik disini adalah selain perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak, perusahaan juga secara tidak langsung memberikan fasilitas kepada pegawai, sehingga pegawai yang mendapat natura yang dimaksudkan dapat lebih produktif lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab disebuah perusahaan, yang kemudian pemberian natura tersebut dijadikan biaya sebagai pengurang pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Dengan dilaksanakannya efektivitas tax planning maka perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang

bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak

Untuk menganalisis hal tersebut, dengan berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya serta latarbelakang yang mengubungkan dengan rumusan masalah serta merujuk pada tinjauan pustaka, maka dapat digambarkan kerangka acuan konseptual berdasarkan pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga dapat digabungkan menjadi suatu pemikiran yang terintegrasi. Pemikiran yang terintegrasi tersebut merupakan kerangka pikir penelitian yang dijadikan model hipotesis sehingga dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini, model penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tampilan table 1, terlihat model hipotesis yang menggambarkan keterkaitan antara efektivitas perencanaan pajak, biaya natura dan efisiensi pajak penghasilan. Hubungan efektivitas perencanaan pajak dan biaya natura dengan efisiensi pajak penghasilan pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tekkay (2015) bahwa perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisienkan jumlah pajak yang terhutang, dari perusahaan yang mengakui biaya natura sebagai beban operasional perusahaan. Pada penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sondakh dan Tangkuman (2015), Putro (2012), Budarso dan Marentek (2016), Natakharisma dan Sumadi (2014), Rori (2013), Salitonga (2013), Suronoto (2013), Sabijono dan Walandouw (2014) menyatakan bahwa dengan dilakukannya tax planning maka dapat menghemat atau mengefisienkan pembayaran pajak penghasilannya.

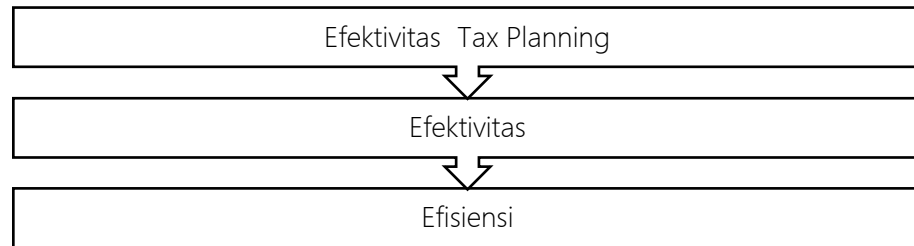
H1 :Perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya melalui biaya natura kepada pegawai perusahaan PT. Bumi Karsa

H0 :Perusahaan tidak dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya melalui biaya natura kepada pegawai perusahaan PT. Bumi Karsa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian (Sugiyono, 2010). Penelitian ini dilakukan dalam lingkup PT. Bumi Karsa Makassar. Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data yaitu, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan rincian biaya operasional PT. Bumi Karsa tahun 2016 sebagai populasi penelitiannya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi PT. Bumi Karsa tahun 2015. semua data yang diperoleh dari PT. Bumi Karsa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana efektivitas perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan, khususnya PT. Bumi Karsa.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Tahap Analisis Data

Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian.

1. Efektivitas perencanaan pajak adalah salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha.
2. Biaya Natura adalah adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.
3. Pajak penghasilan, diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

PT. Bumi Karsa Makassar adalah perusahaan Nasional yang merupakan anak perusahaan dari Kalla Group dengan bisnis utama dalam bidang Konstruksi, Investasi, Plant dan Alat Berat. PT. Bumi Karsa didirikan di Ujung Pandang pada tanggal 14 Februari 1969. PT. Bumi Karsa Makassar dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan jasa konstruksi di bidang sipil dan arsitektur dengan berkomitmen pada Biaya, Mutu, Waktu, K3, dan kerjasama yang sinergi serta senantiasa memberikan jaminan terhadap kepuasan pelanggan. Dalam kurun waktu yang cukup lama ini, karya pengabdian PT. Bumi Karsa menunjang Pembangunan Nasional tersebar di berbagai pelosok tanah air, khususnya di Indonesia Bagian timur.

Setelah penulis melakukan penelitian, dalam komponen beban operasi terdapat biaya makan/konsumsi dan biaya tiket yang menjadi tunjangan cuti pada setiap karyawan proyek yang akan diserahkan setiap tiga bulan. Biaya tersebut tidak diakui oleh pihak fiskus karena merupakan biaya natura sehingga menjadikan laba kena pajak pada laporan keuangan yang menjadi lampiran pada SPT Badan PT. Bumi Karsa menjadi lebih besar adapun data rincian beban operasi PT. Bumi Karsa yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Beban Operasi PT. Bumi Karsa Sebelum Tax Planning 31 Desember 2016

Jenis Biaya	Nominal
Biaya Alat	Rp 436.058.885
Fuel (Solar)	Rp 2.577.460
Biaya Sub Kontraktor	Rp 20.253.494
Material Pembantu	Rp 47.681.800
Biaya Angkut Material	Rp 49.980.800
Alat (Tools)	Rp 250.814.730
Biaya Tambahan (Maintance)	Rp 181.944.532
Biaya Umum Lapangan	Rp 81.183.080
Biaya Jaminan dan Asuransi	Rp 63.154.932
Biaya atas Restitusi	Rp 2.500.000
Retribusi Tambang Golongan. C	Rp 82.127.622
Biaya Material Alam	Rp 17.646.016
Biaya Penyusutan	Rp 94.244.564
OH Kantor Pusat	Rp 19.395.186
Resiko Konstruksi	Rp 794.110.168
Biaya Makan/Minum	Rp -
Biaya Tiket/Cuti	Rp -
Total	Rp 2.143.673.269

Sumber : Data Akuntansi Plant 2017

Pada tabel 4, rincian beban operasi dari PT Bumi Karsa per 31 Desember 2016 dapat dilihat berbagai biaya yang diakumulasikan sebagai beban operasi yang mencapai jumlah sebanyak Rp. 2,143,673,269 yang merupakan jumlah biaya sebelum dilaksanakan tax planning yang dimana biaya makan/konsumsi dan biaya tiket yang menjadi tunjangan cuti pada setiap karyawan proyek yang akan diserahkan setiap tiga bulan tidak diakui oleh pihak fiskus karena biaya tersebut merupakan biaya natura sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung pajak terutang untuk PPh Badan PT. Bumi Karsa.

Tabel 2. Laporan Laba (Rugi) PT. Bumi Karsa Sebelum Tax Planning 31 Desember 2016

Pendapatan Kontrak Induk	Rp	3.292.057.345	Rp	7.733.325.086
Saldo Awal persediaan	Rp	4.838.722.362		
Persediaan Akhir				
Biaya langsung			Rp	2.776.239.231
Lab Kotor			Rp	3.410.420.838
Beban Operasional			Rp	2.143.673.269
Lab Operasi			Rp	1.266.747.569
Pendapatan Jasa sewa Alat	Rp	38.665.185		
pendapatan Jasa Penjualan Material	Rp	400.055.945		
Pendapatan Lain-lain	Rp	117.646.926		
Jumlah Pendapatan Lain-lain			Rp	556.368.056
laba Bersih Sebelum pajak			Rp	1.823.115.625
Pajak Penghasilan			Rp	455.778.906
Laba Bersih setelah Pajak			Rp	1.367.336.719

Sumber : Data Akuntansi Plant 2017

Pada tabel 2, dapat dilihat laba bersih sebelum pajak yang diperoleh pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 1,823,115,625 dan pajak PPh badan PT. Bumi Karsa yang terutang pada tahun 2016 sebesar Rp. 455,778,906, dimana nilai hutang pajak tersebut merupakan hasil perhitungan dari laporan keuangan sebelum tax planning.

Pembahasan

Penerapan tax planning merupakan suatu hal yang mutlak bahwa perusahaan dapat mengerti metode yang tepat sebagai sarana untuk mengefesienkan beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Bumi Karsa sebagai salah satu perusahaan yang terbilang cukup besar, tentunya sangat membutuhkan suatu tax planning sebagai upaya yang tepat untuk mengefesienkan setiap hutang pajak dari setiap tahunnya. PT bumi Karsa pada tahun 2016 mengakui semua biaya yang dimasukkan kedalam rincian beban telah mencapai jumlah Rp. 2,143,673,269 yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh PT. Bumi Karsa selama ini adalah pemberian natura, yang menurut teori yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembayaran natura kepada karyawan pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Akan tetapi jika pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan pangan maupun

tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pemberian tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi karyawan.

Sebagaimana sebelumnya dikatakan bahwa pada PT Bumi Karsa memberikan tunjangan dalam bentuk tunjangan pangan yaitu merupakan pemberian makan siang pada saat istirahat yang berarti bisa diakumulasikan atau diakui sebagai biaya pada beban operasional. Untuk memaksimalkan kesejahteraan karyawan sekaligus meminimalkan beban pajak, maka perusahaan harus selektif dalam memilih natura atau kenikmatan apa yang sebaiknya diberikan kepada karyawan. Jika saja pemberian natura kepada karyawan perusahaan diberikan secara berkelanjutan maka manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan selain sebagai sarana untuk mengefisienkan pajak adalah loyalitas dari karyawan perusahaan dan dapat juga berdampak pada untuk efektifitas waktu kerja seluruh karyawan perusahaan.

Laporan keuangan PT Bumi Karsa Makassar, selain menjelaskan pelaporan posisi keuangan perusahaan juga sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari Bagian Keuangan bersama-sama dengan Owner serta juga sebagai evaluasi kinerja oleh setiap bidang dalam perusahaan maupun sistem yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka pemberian natura kepada karyawan dalam bentuk makan siang untuk karyawan perusahaan sudah dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu rincian beban operasional perusahaan. Berikut merupakan rincian beban operasional perusahaan pengakuan biaya natura kepada karyawan perusahaan PT Bumi Karsa apabila dilakukan tax planning sehingga dapat dibandingkan dari sebelum dilakukannya tax planning dan sesudah dilakukannya tax planning.

Tabel 3. Perbandingan Rincian Beban Operasi PT. Bumi Karsa Sebelum dan Sesudah Tax Planning.

Jenis Biaya	Sebelum tax planning	Setelah tax planning
Biaya Alat	Rp 436.058.885	Rp 436.058.885
Fuel (Solar)	Rp 2.577.460	Rp 2.577.460
Biaya Sub Kontraktor	Rp 20.253.494	Rp 20.253.494
Material Pembantu	Rp 47.681.800	Rp 47.681.800
Biaya Angkut Material	Rp 49.980.800	Rp 49.980.800
Alat (Tools)	Rp 250.814.730	Rp 250.814.730
Biaya Tambahan (Maintance)	Rp 181.944.532	Rp 181.944.532
Biaya Umum Lapangan	Rp 81.183.080	Rp 81.183.080
Biaya Jaminan dan Asuransi	Rp 63.154.932	Rp 63.154.932
Biaya atas Restitusi	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Retribusi Tambang Golongan. C	Rp 82.127.622	Rp 82.127.622
Biaya Material Alam	Rp 17.646.016	Rp 17.646.016
Biaya Penyusutan	Rp 94.244.564	Rp 94.244.564
OH Kantor Pusat	Rp 19.395.186	Rp 19.395.186
Resiko Konstruksi	Rp 794.110.168	Rp 794.110.168
Biaya Makan/Minum	Rp -	Rp 64.800.000
Biaya Tiket/Cuti	Rp -	Rp 1.220.000
Total	Rp 2.143.673.269	Rp 2.209.693.269

Tabel 4. Laba/Rugi PT. Bumi Karsa Sebelum Tax Planning 31 Desember 2016

Pendapatan Kontrak Induk		Rp 7.733.325.086
Saldo Awal persediaan	Rp 3.292.057.345	
Persediaan Akhir	Rp 4.838.722.362	
Biaya langsung		Rp 2.776.239.231
Laba Kotor		Rp 3.410.420.838
Beban Operasional		Rp 2.143.673.269
Laba Operasi		Rp 1.266.747.569
Pendapatan Jasa sewa Alat	Rp 38.665.185	
pendapatan Jasa Penjualan Material	Rp 400.055.945	
Pendapatan Lain-lain	Rp 117.646.926	
Jumlah Pendapatan Lain-lain		Rp 556.368.056
laba Bersih Sebelum pajak		Rp 1.823.115.625
Pajak Penghasilan		Rp 455.778.906
Laba Bersih setelah Pajak		Rp 1.367.336.719

Tabel 5. Laba/Rugi PT. Bumi Karsa Setelah *Tax Planning* 31 Desember 2016

Pendapatan Kontrak Induk			Rp	7.733.325.086
Saldo Awal persediaan	Rp	3.292.057.345		
Persediaan Akhir	Rp	4.838.722.362		
Biaya langsung			Rp	2.776.239.231
Laba Kotor			Rp	3.410.420.838
Beban Operasional			Rp	2.209.093.269
Laba Operasi			Rp	1.201.327.569
Pendapatan Jasa sewa Alat	Rp	38.665.185		
pendapatan Jasa Penjualan Material	Rp	400.055.945		
Pendapatan Lain-lain	Rp	117.646.926		
Jumlah Pendapatan Lain-lain			Rp	556.368.056
laba Bersih Sebelum pajak			Rp	1.757.695.625
Pajak Penghasilan			Rp	439.423.906
Laba Bersih setelah Pajak			Rp	1.318.271.719

Sumber : Data Akuntansi Plant 2017

Pada tabel 3, dapat dengan jelas dilihat perbandingan antara Rincian Beban Operasi sebelum dan sesudah dilakukannya tax planning. Pada tabel 06 dapat dilihat perbedaan total dari rincian Biaya PT. Bumi Karsa, perbedaan tersebut dikarenakan jumlah penambahan biaya makan/minum dan biaya tiket/cuti yang diakumulasi kedalam beban operasi. Dengan diperolehnya jumlah beban operasi setelah tax planning maka beban tersebut dapat dimasukkan didalam laporan laba/rugi yang menjadi dasar perhitungan untuk mencari pajak terhutang PPh badan PT. Bumi Karsa maka pajak terhutang PPh badan PT. Bumi Karsa yang diperoleh lebih kecil dibandingkan pajak terhutang PPh badan PT. Bumi Karsa yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan laporan laba/rugi sebelum dilakukan tax planning. Perbedaan ini dapat dijelaskan dengan melihat tabel laba/rugi sebelum dilakukan tax planning dan table laba/rugi setelah dilakukan tax planning beserta perbandingan dari laporan laba rugi tersebut.

Dari uraian di sebagaimana tampilan table, jumlah pajak terhutang setelah dilakukannya tax planning dapat diefisienkan yaitu sebesar perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pajak sebelum tax planning - Jumlah pajak setelah tax planning

Rp. 455,778,906 – Rp. 439,423,906 = Rp. 16, 355,000

Jadi, dari perhitungan pajak terhutang di atas didapatkan jumlah sebanyak Rp. 16,355,000 Sebagai jumlah yang bisa diefisienkan oleh perusahaan untuk diakui sebagai keuntungan dari perusahaan. Penerapan tax planning pada PT Bumi Karsa kali ini mampu mengefisienkan pajak. Dengan demikian bahwa penerapan perencanaan pajak dengan memberikan natura kepada karyawan pada perusahaan PT Bumi Karsa dianggap berhasil mengefisienkan beban pajak perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Tekkay (2011) menyatakan penerapan tax planning dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi pajak perusahaan sejalan dengan hasil penelitian Vyakana Natakharisma & I Kadek Sumadi (2014) menyatakan analisis setelah tax planning pajak penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan sebelum dilakukannya tax planning dan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan. Disamping itu, terdapat dua keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu berkurangnya beban pajak perusahaan dan juga meningkatnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti bahwa perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya melalui biaya natura kepada karyawan perusahaan PT. Bumi Karsa

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sebuah perusahaan penentuan setiap biaya yang diakui sebagai beban operasional haruslah mempertimbangkan setiap biaya yang tetap sebagai biaya dari pihak perusahaan maupun oleh pihak kantor pajak sehingga pada saat penentuan penghasilan neto didapatkan hasil yang benar – benar merupakan pendapatan bersih yang akan dikurangkan dengan penghasilan kena pajak. Penerapan tax planning atau perencanaan pajak dengan memberikan natura kepada karyawan pada perusahaan PT Bumi Karsa berhasil untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan. Dan biaya natura pada setiap perusahaan menjadi salah satu langkah kongkrit dalam mengefisienkan beban pajak perusahaan selain itu juga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan khususnya yang berhubungan dengan loyalitas dari setiap pegawai yang ada dalam perusahaan dan menghemat jeda waktu dalam istirahat apabila natura untuk tunjangan pangan diberikan pada waktu istirahat siang.

Saran yang dapat diambil bagi Manajemen PT. Bumi Karsa dalam mengoperasikan perusahaan sebaiknya menggunakan tax planning sebagai upaya dalam jangka waktu yang panjang. Sebisa mungkin menggunakan tax planning yang turut memberikan kesejahteraan karyawan akan meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan.

REFERENSI

- Erly, Suandi. 2006. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Marentek, Edwar Administer & Budiarmo, Novi. 2016. The Evaluation of Tax planning Implementation to Minimize The Value Added Tax at PT. Transworld Solution South Jakarta. Jurnal EMBA. Vol. 4. No.1. ISSN 2303-1174
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- _____. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muaja, Rifaldi Josua. Sondakh, Jullie & Tangkuman, Steven. 2015. Tax Planning Implementation Analisis on the Body Mandatory PT. Elsadai Servo Cons. Jurnal EMBA. Vol.3.No.4. ISSN 2303-1174
- Nyoman Darmayasa dan Nyoman Sentosa Hardika, 2011, Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak. Jurnal Bisnis dan kewirausahaan, Vol 7 No. 3
- NataKharisma, Vyakana & Sumadi, I kadek. 2014. Analisis Tax Planning dalam meningkatkan optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT. CHIDEHAFU. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2. ISSN 2302-8556
- Nur Hidayat, 2005. Tax Planning Bukan Untuk Hindari Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Puspita, Andreas Hendro. 2010. Pajak Bumi dan Bangunan untuk Para Praktisi. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. ISSN 2303-1174
- Santoso, Singgih. 2007. Statistik Deskriptif: Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft Excel dan SPSS. Yogyakarta
-

-
- Santana, Dewa Ketut Wira dan Wirakusuma, Made Gede. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Managerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktek Managemen laba. E-Jurnal Akuntansi Universitas udayana.14.3. ISSN 2302-8559.
- Sudirman, S., & Muslim, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Madya Makassar). CESJ: Center Of Economic Students Journal, 1(1), 1-13.
- Supadmi. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualiiitas. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Vol. 4, No. 2.
- Suronoto, Vinska Faradelah. 2013. Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Tri Murni. Junal EMBA. Vol.1. No.4. ISSN 2303-1174.
- Supriyanto, Edy.2011. Akuntansi perpajakan. Jogyakarta : Graha Ilmu
- Suhartono, Rudydan Ilyas, Wirawan B. 2010. Perpajakan, Eksoklopedia Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Alfabeta
- Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado. Jurnal EMBA. Vol.1. No. 3. ISSN 2303-1174
- Tekkay, Alfons Adenansi. 2015. Tax planning For Natura Costs to EmployeesOf The Company as an Effrot to Streamline Tax PT. Tiga Karya Wenang Manado. Jurnal EMBA. Vol.3.No.3. ISSN 2303-11.
- Wibowo, Stephanie & Mangoting, Yenni. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Malakukan Tax Planning. Tax & Accounting Review. Vol.1 No. 1.
- Wulyono. 2012. Akuntansi Pajak, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Wijaya, M., dan D. Martani, 2011, Praktik Manajemen Laba Perusahaan dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak sesuai UU No. 36 Tahun 2008. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh
- Yenni Mangoting. 1999. Tax Palanning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Universitas Kristen Petra: Semarang.
- Zain Mohammad, 2003, Manajemen Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentaun dan Cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.s.d.t.d.) UU Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 181 /PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata carapengambilan, ppengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Bps.co.id, 2015. Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan.<http://www.bppk.kemenkeu.artikel.anggaran.danperbendaharaan/20495> pengelolaan.sumbr.penerimaan.pajak.sebagai.sumber.pendanaan.utama.dalam.pembanguna n. (Diakses 04 September 2016)
- Bppk. depkeu.go. id. 2014. artikel-pajak-natura- atau-tunjangan- sebuah nama-sebuah cerita <http://www.Bppk.depkeu.go.id>. (Diakses 10 September 2016)
-

[https://www.scribd.com/doc/274909850/Analisis-Penerapan Perencanaan-Pajak-Tax-Planning-Untuk-Efisiensi-Pajak- Penghasilan- Badan-Pada-CV-F2-Berkarya](https://www.scribd.com/doc/274909850/Analisis-Penerapan-Perencanaan-Pajak-Tax-Planning-Untuk-Efisiensi-Pajak-Penghasilan-Badan-Pada-CV-F2-Berkarya). (Diakses 12 September 2016)

<https://www.academia.edu/9339240/AKUNTANSI-PERPAJAKAN> (Diakses 12 September 2016)

[http://wulansari-wulansari3.blogspot.co.id /p/asas-pemungutan pajak.html](http://wulansari-wulansari3.blogspot.co.id/p/asas-pemungutan-pajak.html). (Diakses 20 September 2016)

[http://hukum-pajak.blogspot.co.id/2010/04/tata -cara- pemungutan - pajak. html](http://hukum-pajak.blogspot.co.id/2010/04/tata-cara-pemungutan-pajak.html) (Diakses 22 September 2016)

[http://literaturbook.blogspot.co.id /2014/12 / pengertian – efektivitas - dan landasan.html](http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html). (Diakses 01 April 2017)

[http://literaturbook.blogspot.com/ 2014/12/ Muasaroh. 2010. Pengertian -efektivitas-dan-landasan.html](http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/Muasaroh.2010.Pengertian-efektivitas-dan-landasan.html), (Diakses 01 April 2017)